



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABU HAERA**
2. Jabatan : **WAKIL BUPATI**
3. NHK : **752315**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.805.600.000
1. Tanah Seluas 6951 m2 di KAB / KOTA KONAWE UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 78.000.000		
2. Tanah Seluas 4189 m2 di KAB / KOTA KONAWE UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 76.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 339 m2/180 m2 di KAB / KOTA KONAWE UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000		
4. Tanah Seluas 13010 m2 di KAB / KOTA KONAWE UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000		
5. Tanah Seluas 12070 m2 di KAB / KOTA KONAWE UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
6. Tanah dan Bangunan Seluas 5431 m2/520 m2 di KAB / KOTA KONAWE UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 901.600.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	389.000.000
1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 297.000.000		
2. MOBIL, VIOS SEDAN Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 92.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	120.520.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	46.471.566



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp.

Rp.

3.361.591.566

III. HUTANG

Rp.

257.367.380

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.104.224.186

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.